

BAB V

KESIMPULAN

Anak-anak merupakan Anugrah yang diberikan oleh Tuhan YME pada setiap keluarga yang harus dijamin keamanannya. Konflik di Myanmar telah membawa dampak perkembangan HAM yang buruk terutama bagi perkembangan hak-hak anak. Myanmar merupakan negara yang penuh masalah internal yang menyebabkan konflik merupakan fenomena yang sering dan mudah terjadi di Myanmar. Masalah atas perbedaan etnis, masalah perkembangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tuntutan otonomi daerah yang lebih luas oleh kelompok bersenjata non negara yang menyulut konflik di Myanmar. Seringnya konflik yang terjadi di Myanmar, membuat setiap kelompok yang berkonflik dituntut oleh jenderal kelompok mereka untuk merekrut banyak pasukan guna meningkatkan kekuatan kelompok tersebut.

Kurangnya kehadiran prajurit yang bergabung secara sukarela, tingginya tingkat pembelotan prajurit karena fasilitas yang buruk untuk para prajurit dan rendahnya gaji untuk prajurit menyebabkan banyak kelompok memilih menggunakan anak-anak direkrut untuk menggantikan orang dewasa yang secara sukarela bergabung. Anak-anak terus direkrut karena anak-anak dapat dengan mudah dipengaruhi, diberi janji-janji fasilitas yang akan didapat ketika menjadi tentara. Para perekrut lebih banyak menggunakan paksaan dan intimidasi dalam merekrut anak-anak karena tidak adanya sistem verifikasi usia dalam perekrutan

Anak-anak di wilayah pedesaan umumnya tidak memiliki akta kelahiran yang sah karena tingginya biayanya dalam pembuatan akta tersebut. Anak-anak terus digunakan dalam konflik bertugas sebagai penanam dan peledak ranjau darat, sebagai kuli, porter, terlibat dalam pertempuran aktif dan masih banyak lagi. Hal tersebut berlawanan jauh dengan kondisi anak yang seharusnya, anak-anak pada umumnya harusnya memiliki kegiatan belajar dan bermain, namun berbeda dengan tentara anak di Myanmar, mereka mendapati kondisi yang sangat buruk, mereka tidak mendapatkan makanan yang bergizi dan pakaian yang layak dan mengalami kekerasan yang membawa trauma tersendiri bagi anak-anak tersebut.

Child soldiers International hadir untuk melakukan advokasi karena Child soldiers International memiliki kepedulian tinggi terhadap isu tentara anak, merupakan sebuah identitas organisasi khusus yang memerangi tindakan penggunaan dan perekrutana anak, sesuai dengan visi organisasi yaitu semua anak (anak laki-laki dan perempuan di bawah usia 18 tahun) di dunia dapat tumbuh dalam kondisi yang memungkinkan mereka untuk menyadari potensi penuh mereka dan menikmati hak asasi manusia mereka dan karena Myanmar merupakan negara yang teridentifikasi extreme dalam menggunakan tentara anak di konflik sipilnya.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh sejumlah INGO, IGO, LSM dan meskipun Myanmar telah menandatangani komitmen Join Action Plan pada tanggal 28 Juni 2012 dengan PBB, tidak membuat situasi fenomena tentara anak di Myanmar membaik secepat mungkin. Perekrutan anak masih terjadi di

International lebih mengupayakan melakukan advokasi melalui PBB dan badan-badan dalam PBB lainnya karena memiliki beberapa hambatan dalam melakukan advokasi langsung ke Myanmar.

Hal tersebut terjadi karena Child Soldiers mengalami beberapa hambatan yaitu ketidakstabilan dana yang terjadi di dalam organisasi karena efek dari transformasi koalisi menjadi organisasi independen dan tingginya biaya operasional dalam melakukan kerja upaya di Myanmar. Keterbatasan akses yang dilakukan oleh SPDC selaku partai yang memiliki kuasa di Myanmar dan merupakan partai pelopor Junta militer dengan alasan untuk keamanan negara. Dan tidak adanya kewenangan yang dimiliki Child Soldiers International untuk mempengaruhi kebijakan Myanmar sehingga strategi advokasi Child Soldiers International ditujukan kepada PBB, badan-badan lain PBB dan masyarakat internasional melalui kerjasama internasional dan sosialisasi